

## ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG

Maria R. A. Nono<sup>1\*</sup>, Rosmiati<sup>2</sup>, R. Setyo Budi Suharto<sup>3</sup> dan Agnes K.B. Mudamakin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

\*E-mail: MariaNono@gmail.com

### Abstract

*This study aims to prove the existence of factors that influence the absorption of the expenditure budget at Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang through filling out a questionnaire for employees at the agency. The focus of this research is on the analysis of factors that influence budget absorption using the aspects of planning documents, human resource factors, and procurement documents. This type of research is causality research, namely a research design designed to examine the possibility of a causal relationship between variables. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression with the help of the SPSS 16 program. The results of this study indicate that there is a positive and significant effect of planning documents, human resources (HR), and procurement documents on budget absorption at Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. The significance level of the planning document variable (0.006) is less than the significant level (0.05); it can be concluded that hypothesis 1 is accepted. The level of significance of the human resources variable (0.025) is less than the significant level (0.05); it can be concluded that hypothesis 2 is accepted. The significance level of the procurement document variable (0.001) is less than the significant level (0.05), it can be concluded that hypothesis 3 is accepted.*

**Keywords:** *Expenditure budget absorption, planning documents, human resources, and procurement documents.*

### PENDAHULUAN

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Secara sederhana, penganggaran daerah (kerap dikenal sebagai penganggaran sektor publik di daerah) dapat dipahami sebagai suatu proses atau metode untuk mempersiapkan dan menyusun anggaran disuatu daerah, yang merupakan penjabaran mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu, dinyatakan dalam ukuran finansial. Ini merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program- program yang dibiayai dengan dana publik. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa anggaran daerah masih harus disempurnakan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum

mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Di samping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisien dan efektif.

Anggaran tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus berguna sebagai alat pengendalian (pengawasan). Dalam setiap proses penganggaran atau perencanaan, setiap satuan kerja merencanakan dan menyusun program dan kegiatan serta pengadaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Setelah satuan kerja menyusun rencana kerja anggaran maka anggaran tersebut harus dibahas bersama dengan DPRD untuk menetapkan keputusan APBD. Agar fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja,

pemerintah daerah terlebih dahulu harus mempunyai Rencana Strategik (Renstra). Renstra merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi saat ini, arahan kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara (strategik) untuk mencapai hal itu. Oleh karenanya, renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya (*positioning*) pada masa yang akan datang. Renstra memberikan petunjuk tentang mengerjakan sesuatu program/ kegiatan yang benar (*doing the right things*). Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam perumusan renstra haruslah jelas dan nyata serta tidak berdwimakna sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk/ arah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Perencanaan dimulai dari perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kalaupun menggunakan peralatan yang canggih dan handal namun tanpa disertai peran aktif sumber daya manusia yang memadai, peralatan tersebut tidak akan bekerja secara maksimal. Untuk mensukseskan rencana kerja pemerintah agar tercipta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, sumber daya manusia dan kerja sama antara pimpinan maupun pelaksana anggaran sangat diperlukan.

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran tahun 2015 sampai dengan 2018 belum mencapai 95%. Dapat dilihat pada tahun 2015 direncanakan anggaran belanja sebesar Rp 1.150.945.136.388,44 namun anggaran belanja yang mampu terserap hanya sebesar Rp 985.978.546.217,85. Kemudian tahun 2016

direncanakan anggaran belanja sebesar Rp 1.314.701.108.744,40 namun anggaran belanja yang mampu terserap hanya sebesar Rp 1.165.593.633.042,00. Pada tahun 2017 direncanakan anggaran belanja sebesar Rp 1.286.026.181.285,63 namun anggaran belanja yang mampu terserap hanya sebesar Rp 1.147.721.807.663,43. Dan di tahun 2018 direncanakan anggaran belanja sebesar Rp 1.269.506.759.068,13 namun anggaran belanja yang mampu terserap hanya sebesar Rp 1.167.614.842.066,80. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah diatas mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di kas daerah. Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (BPKP, 2011). Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektifitas pengalokasian anggaran. Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Penelitian dengan judul ini telah beberapa kali dilakukan oleh beberapa peneliti dan hasilnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda (Anfujatin, 2016; Priatno, 2013; Hasni & Basukianto, 2016; Kirnanda, 2016; Rerung et al, 2017). Maka peneliti ingin menguji kembali penelitian tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang."

**Tabel 1. Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2018**

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	(%)
2015	1.150.945.136.388,44	985.978.546.217,85	164.966.590.170,59	85,67%
2016	1.314.701.108.744,40	1.165.593.633.042,00	149.107.475.702,40	88,66%
2017	1.286.026.181.285,63	1.147.721.807.663,43	138.304.373.622,20	89,25%
2018	1.269.506.759.068,13	1.167.614.842.066,80	101.891.917.001,33	91,97%

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab- akibat antar variabel (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, Jln. S. K. Lerik No. 1, Kota Kupang. Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun 2015-2018. Data primer adalah data yang dipakai penelitian ini yang bersumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah kuisisioner yang disusun berdasarkan variabel- variabel yang diteliti. Data tersebut berupa persepsi atau tanggapan karyawan sesuai dengan pernyataan yang ada dalam kuisisioner.

Teknik pengumpulan data penelitian terdiri atas wawancara, kuisisioner dan studi dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang. sampel dalam penelitian ini adalah 45 orang yang didapat dari perhitungan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dengan:

n= jumlah sampel

N= jumlah populasi

e= *eror margin/* batas normal toleransi kesalahan (ditetapkan 10%)

Maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{82}{1 + 82(10\%)^2}$$

$$n = 45,0549$$

Teknik pengumpulan data secara *purposive sampling*. Penelitian ini penulis menentukan sampel berdasarkan kriteria jabatan yang ditempati, bidang atau sub bidang yang ditempati oleh staf, yaitu kasubag perencanaan dan keuangan beserta staf, kabid anggaran beserta staf, kabid perbendaharaan beserta staf dan kasubag umum dan kepegawaian beserta staf.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang tergolong dalam variabel independent yang dijabarkan dalam indikator-indikator pada tabel 2. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran yang dijabarkan dalam indikator pada tabel 3.

Tabel 2. Indikator Variabel Independen

No	Variabel	Indikator
1	<b>Dokumen Perencanaan (X1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen</li> <li>• Anggaran kegiatan diblokir/ tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan/ proyek tidak melihat rencana/ jadwal yang tercantum dalam DPA atau Rencana Anggaran Belanja (RAB)</li> <li>• RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD tidak sesuai dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</li> <li>• Anggaran tidak selaras dengan RPJMD</li> <li>• Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah (tidak sesuai dengan harga pasar)</li> <li>• Persetujuan revisi DPA dari pejabat berwenang terlambat diterima</li> <li>• Proses revisi anggaran mengalami keterlambatan</li> <li>• DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) perlu revisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>
2	<b>Sumber Daya Manusia (X2)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan pejabat/ pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat</li> <li>• Tidak menempatkan SDM yang berkompeten dalam menyusun anggaran</li> <li>• Panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas)</li> <li>• SDM pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kurang kompeten</li> </ul>
3	<b>Dokumen Pengadaan (X3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlambatnya penyusunan jadwal pelaksanaan lelang</li> <li>• Keterlambatan penandatanganan kontrak</li> <li>• Adanya addendum kontrak</li> </ul>

- Keterlambatan penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa
- Penyedia barang jasa tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang dan jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan

Tabel 3. Indikator Variabel Dependen

No	Variabel	Indikator
1	<b>Penyerapan Anggaran (Y)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat penyerapan anggaran belum mencapai lebih dari 95%</li> <li>• Tingkat penyerapan anggaran menurun dari tahun berikutnya</li> <li>• Persentase penyerapan anggaran pada SKPD pernah mendapat raport merah.</li> </ul>

Teknis analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 16 (Statistical Package for Social Science). Analisa menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji simultan (uji F), uji parsial (uji T), dan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dalam hal ini adalah:

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Dokumen Perencanaan

X2 = Sumber Daya Manusia

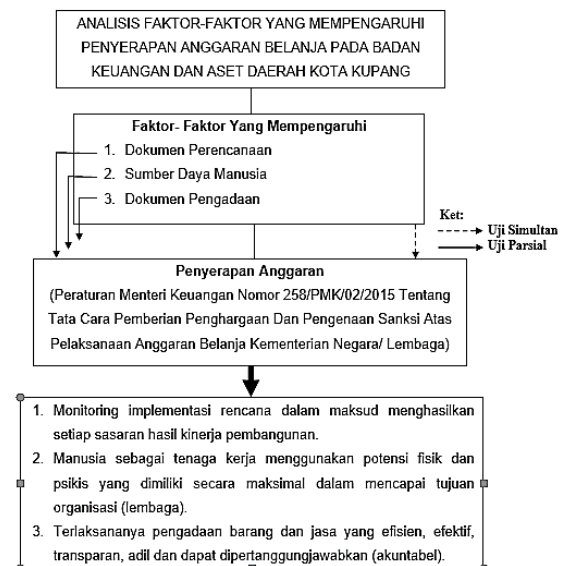
X3 = Dokumen Pengadaan

Y = Penyerapan Anggaran

b1, b2, b3 = Koefisien regresi untuk X1, X2, X3

e = error

Kerangka berpikir penelitian ini tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Uji Validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa data tersebut valid dan reliabel yang tersaji pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	R Tabel	Pearson Correlation	Status
Penyerapan Anggaran (Y)	Y.1	0,294	0,363	Valid
	Y.2	0,294	0,878	Valid
	Y.3	0,294	0,906	Valid
Dokumen Perencanaan (X1)	X1.1	0,294	0,361	Valid
	X1.2	0,294	0,362	Valid
	X1.3	0,294	0,803	Valid
	X1.4	0,294	0,851	Valid
	X1.5	0,294	0,937	Valid
	X1.6	0,294	0,499	Valid
	X1.7	0,294	0,338	Valid
	X1.8	0,294	0,309	Valid
	X1.9	0,294	0,632	Valid
SDM (X2)	X2.1	0,292	0,702	Valid
	X2.2	0,294	0,689	Valid
	X2.3	0,294	0,759	Valid

	X24	0,294	0,838	<b>Valid</b>
	X3.1	0,294	0,775	<b>Valid</b>
Dokumen	X3.2	0,294	0,875	<b>Valid</b>
Pengadaan	X3.3	0,294	0,798	<b>Valid</b>
(X3)	X3.4	0,294	0,878	<b>Valid</b>
	X3.5	0,294	0,835	<b>Valid</b>

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas	Ket.
Penyerapan Anggaran (Y)	0,797	<b>0,6</b>	<b>Reliabel</b>
Dokumen Perencanaan (X1)	0,749	<b>0,6</b>	<b>Reliabel</b>
Sumber Daya Manusia (X2)	0,796	<b>0,6</b>	<b>Reliabel</b>
Dokumen Pengadaan (X3)	0,813	<b>0,6</b>	<b>Reliabel</b>

Uji normalitas pada tabel 6, menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk dokumen perencanaan ( $0,328 \geq 0,05$ ), sumber daya manusia ( $0,184 \geq 0,05$ ), dokumen pengadaan ( $0,105 \geq 0,05$ ), dan untuk variabel penyerapan anggaran ( $0,072 \geq 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Normalitas

Variabel	N	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kolmogorov - Smirnov Z	Ket
Dok. Perencanaan	45	.328	.949	<b>Normal</b>
SDM	45	.184	1.092	<b>Normal</b>
Dok. Pengadaan	45	.105	1.214	<b>Normal</b>
Penyerapan Anggaran	45	.072	1.290	<b>Normal</b>

Uji hipotesis persamaan regresi berganda diperoleh:

$$Y = 0,255 + 0,177 x_1 + 0,154 x_2 + 0,213 x_3$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah:

- Nilai konstanta positif sebesar 0,255 menunjukkan pengaruh positif variabel independen (dokumen perencanaan, sumber daya manusia dan dokumen pengadaan). Apabila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel penyerapan anggaran akan naik atau terpenuhi.

- Koefisien regresi X1 sebesar 0,177 menyatakan bahwa apabila dokumen perencanaan mengalami kenaikan satu satuan, maka penyerapan anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,177 atau 17,7%.
- Koefisien regresi X2 sebesar 0,154 menyatakan bahwa apabila sumber daya manusia mengalami kenaikan dalam satu satuan, maka variabel penyerapan anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,154 atau 15,4%.
- Koefisien regresi X3 sebesar 0,213 menyatakan bahwa apabila dokumen pengadaan mengalami kenaikan dalam satu satuan, maka variabel penyerapan anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,213 atau 21,3%.
- Hasil uji pada tabel 7 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan juga nilai  $f_{hitung}$  lebih besar dari  $f_{tabel}$  ( $48,928 \geq 2,83$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan ketiga variabel mampu menjelaskan fenomena penyerapan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	142.714	3	47.571	48.928	.000 <sup>a</sup>

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.255	.665		.384	.703
Dok.Perencanaan	.177	.061	.384	2.915	.006
SDM	.154	.066	.231	2.325	.025
Dok.Pengadaan	.213	.060	.389	3.524	.001

Tabel 9. Hasil Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 <sup>a</sup>	.782	.766	.98604

Berdasarkan tabel 8 tingkat signifikansi variabel X1 dokumen perencanaan (0,006) kurang dari tingkat signifikan (0,05) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2.915 \geq 2.021$ ) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dokumen perencanaan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) serta memiliki arah pengaruh yang positif ( $\beta = 0,177$ ), oleh karena itu hipotesis 1 **diterima**. Hal ini berarti semakin baik dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh BKAD Kota Kupang maka penyerapan anggaran tentu akan semakin baik.

Berdasarkan tabel 8 tingkat signifikansi variabel X2 sumber daya manusia (0,025) kurang dari tingkat signifikan (0,05) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2.325 \geq 2.021$ ) maka secara parsial variabel sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran serta memiliki arah pengaruh yang positif ( $\beta = 0,154$ ), jadi hipotesis 2 **diterima**. Hal ini berarti semakin memadai kompetensi sumber daya manusia yang ada pada BKAD Kota Kupang maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabel 8 tingkat signifikansi variabel X3 dokumen pengadaan (0,001) kurang dari tingkat signifikan (0,05) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3.524 \geq 2.021$ ) maka secara parsial variabel dokumen pengadaan berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran serta memiliki arah pengaruh yang positif ( $\beta = 0,213$ ), jadi hipotesis 3 **diterima**. Hal ini berarti semakin baik dokumen pengadaan pada BKAD Kota Kupang maka akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Tabel 9 menjelaskan bahwa besarnya nilai nilai R *square* berdasarkan hasil uji koefisien determinasi adalah sebesar 0,782 yang mana nilai tersebut merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,782, yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen (dokumen perencanaan, sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan) terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran) adalah sebesar 78,2%, sedangkan sisanya yakni 21,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti faktor administrasi, regulasi, dan uang persediaan.

#### **Pembahasan** **Pengaruh Dokumen Perencanaan Terhadap**

#### **Penyerapan Anggaran**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari pilihan jawaban responden pada BKAD Kota Kupang yang menghasilkan dokumen perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang.

Berdasarkan pernyataan kuisisioner mengenai dokumen perencanaan yang dijawab oleh responden, pernyataan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 1 dan 2. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik dokumen perencanaan yang dibuat oleh BKAD Kota Kupang maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden pada variabel penyerapan anggaran yang terbesar berada pada skala 3 dan 4 dimana hal ini menunjukkan penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang tergolong masih tinggi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dokumen perencanaan pada BKAD Kota Kupang sudah cukup baik, namun masih ada beberapa faktor yang menyebabkan dokumen perencanaan pada BKAD Kota Kupang dirasa belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang memilih jawaban pada skala 1 terhadap pernyataan "anggaran kegiatan diblokir/ tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR". Contohnya adalah anggaran untuk belanja bantuan sosial dan juga belanja barang dan jasa. Akan tetapi anggaran ini tidak diblokir secara permanen, yang artinya anggaran tersebut bisa dibuka kembali dengan cara melengkapi dokumen pendukung seperti RKA Satker, TOR/ Rencana anggaran belanja, dan juga dasar hukum yang terkait dengan anggaran yang akan diajukan. Selain itu juga ada item pernyataan lain yang mendapatkan skala 1 yakni "salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen". Contohnya adalah kesalahan penetapan akun belanja pada saat penganggaran seperti dalam belanja dalam rangka menghasilkan aset tetap tapi dibiayai dengan non-belanja modal, dan belanja yang tidak menghasilkan aset tetap dibiayai dengan belanja modal. Apabila hal ini terjadi, maka anggaran tidak dapat dicairkan sehingga harus

dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu sehingga pencairan dana bisa dilakukan. Hal ini tentunya akan memberikan tambahan waktu dalam merevisi kembali dokumen anggaran yang mana akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang.

Berkenaan dengan poin dari visi misi BKAD Kota Kupang “terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel” maka hasil temuan diatas menunjukkan bahwa visi misi belum tercapai secara maksimal karena masih sering terjadinya kesalahan dalam penentuan akun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Priatno (2013) yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran**

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari pilihan jawaban responden pada BKAD Kota Kupang yang menghasilkan sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang.

Berdasarkan pernyataan kuisisioner mengenai sumber daya manusia yang dijawab oleh responden, pernyataan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 1 dan 2. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin memadai kompetensi SDM pada BKAD Kota Kupang maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden terhadap variabel penyerapan anggaran yang terbesar berada pada skala 3 dan 4 dimana hal ini menunjukkan penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang tergolong masih tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada BKAD Kota Kupang sudah cukup memadai, namun masih ada juga faktor yang menyebabkan sumber daya manusia pada BKAD Kota Kupang dirasa belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang memilih jawaban pada skala 1 terhadap pernyataan “Keterbatasan pejabat/ pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat”. Artinya masih terdapat pegawai- pegawai pada BKAD Kota Kupang yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 17 (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa PPK dan Panitia / Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Padahal untuk mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa harus melalui serangkaian ujian sertifikasi cukup berat dengan tingkat kelulusan yang rendah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pegawai yang bersertifikat ahli pengadaan barang/ jasa. Faktor adanya keterbatasan SDM membawa pengaruh bagi penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang.

Berkenaan dengan poin dari visi misi BKAD Kota Kupang yakni “meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana prasarana”, maka temuan dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa visi misi belum tercapai secara maksimal karena masih ada pegawai- pegawai yang belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anfujatin (2016) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Dokumen Pengadaan Terhadap Penyerapan Anggaran**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari pilihan jawaban responden pada BKAD Kota Kupang yang menghasilkan dokumen pengadaan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang.

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan kuisisioner mengenai dokumen pengadaan, pernyataan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 2. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada BKAD Kota Kupang maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden terhadap variabel penyerapan anggaran yang memiliki nilai terbesar pada skala adalah 3 dan 4 dimana hal ini menunjukkan penyerapan anggaran pada BKAD Kota Kupang tergolong masih tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada faktor yang menyebabkan dokumen

pengadaan pada BKAD Kota Kupang dirasa belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pilihan jawaban pada skala 2 oleh responden terhadap pernyataan “terlambatnya jadwal pelaksanaan lelang” dalam hal ini panitia lelang tidak melakukan percepatan pelaksanaan pelelangan sebelum anggaran turun atau dicairkan, karena panitia tidak berani mengambil resiko apabila anggaran untuk kegiatan terlambat atau tidak dicairkan karena adanya revisi terhadap dokumen anggaran yang mana hal ini menjawab item pernyataan pada faktor dokumen perencanaan. Jadi dokumen anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berkenaan dengan poin dari visi misi BKAD Kota Kupang yakni “meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana prasarana”, maka temuan dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa visi misi belum tercapai secara maksimal karena masih sering terjadinya keterlambatan pelaksanaan lelang yang disebabkan oleh panitia lelang tidak melakukan percepatan pelaksanaan pelelangan sebelum anggaran turun atau dicairkan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anfujatin (2016) yang menyatakan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Dokumen Perencanaan (X1), SDM (X2), dan Dokumen Pengadaan (X3) terhadap Penyerapan Anggaran (Y)**

Semua variabel independen (X1, X2 dan X3) dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16 diperoleh hasil penelitian untuk Uji Simultan (Uji F) dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 48.928 yang mana nilai  $F_{hitung}$  ini lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  (2,83), dan nilai signifikan  $0,00 \leq 0,05$  maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F disimpulkan bahwa dokumen perencanaan (X1), sumber daya manusia (X2), dan dokumen pengadaan (X3) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penyerapan anggaran (Y).

## **PENUTUP**

Kesimpulan hasil analisis dan pembahasan mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diperoleh hasil bahwa: Dokumen perencanaan

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang mana hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel dokumen perencanaan 0,006 kurang dari tingkat signifikan 0,005. Selain itu ada item pernyataan pada kuisisioner mengenai dokumen perencanaan yang mendapat jawaban dengan skala 1 dari responden yakni “anggaran kegiatan diblokir/ tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR” dan juga “salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen”. Apabila hal ini terjadi, maka anggaran tidak dapat dicairkan sehingga harus dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu agar pencairan dana bisa dilakukan, yang mana ini tentunya membawa pengaruh pada penyerapan anggaran.

Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang mana hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel sumber daya manusia 0,025 kurang dari tingkat signifikan 0,005. Selain itu ada item pernyataan pada kuisisioner mengenai sumber daya manusia yang mendapat jawaban dengan skala 1 terhadap pernyataan “Keterbatasan pejabat/ pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat”. Artinya masih terdapat pegawai-pegawai pada BKAD Kota Kupang yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran nantinya.

Dokumen pengadaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang mana hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan variabel dokumen pengadaan = 0,001 kurang dari tingkat signifikan 0,005. Selain itu ada item pernyataan pada kuisisioner mengenai dokumen pengadaan yang mendapat jawaban dengan skala 2 terhadap pernyataan “terlambatnya jadwal pelaksanaan lelang”. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, maka dapat diberikan saran- saran yang kiranya dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya sebagai berikut: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dalam merencanakan anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya harus melengkapi segala dokumen pendukung seperti RKA satker, TOR/ rencana anggaran belanja serta dasar hukum yang berkaitan dengan anggaran yang akan diajukan sehingga tidak terjadinya pemblokiran anggaran pada tahun anggaran berjalan. Selain itu dalam penyusunan RKA harus lebih cermat dan teliti sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan penentuan akun pada dokumen anggaran agar tidak ada lagi revisi



dokumen sehingga tidak menghambat pencairan anggaran.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, dapat dilakukan mengikutsertakan pegawai dalam diklat terkait sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Selain itu, perlu adanya reward bagi panitia pengadaan barang dan jasa, guna untuk meningkatkan minat dan motivasi bagi setiap pegawai agar bisa mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka mengatasi terlambatnya penyusunan jadwal pelaksanaan lelang, penetapan panitia pengadaan barang dan jasa sebaiknya dilakukan lebih awal sesaat setelah anggaran ditetapkan oleh DPRD untuk menghindari terjadinya keterlambatan penyusunan jadwal pelaksanaan lelang, selain itu PPK hendaknya mengajukan KAK (Kerangka Acuan Kerja) ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) segera setelah RUP (Rencana Umum Pengadaan) ditetapkan sehingga jadwal pengadaan bisa dilakukan tepat waktu. Selain itu pelaksanaan lelang juga berkaitan dengan faktor dokumen perencanaan. Apabila dokumen perencanaan kedepannya sudah baik maka tidak akan terjadinya keterlambatan pelaksanaan lelang.

Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).

Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(2).

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

## DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Skpd Kabupaten Tuban. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 14(01). <https://doi.org/10.30996/dia.v14i01.1014>
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta Review.
- Hasni, N. T., & Basukianto, B. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmiah Telaah Manajemen*, 13(1).
- Kirnanda, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai dengan Perubahan Anggaran sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara
- Priatno, P. A., & Khusaini, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi